



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good govermance* merupakan prasyarat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (Evaluasi) kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dengan TUPOKSI dan RENSTRA yang telah ditetapkan.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe selama kurun waktu 1 (satu) tahun, hal tersebut dituangkan dalam Pengukuran Kinerja yang meliputi Capaian Indikator Kinerja Utama, Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menetapkan visi:

“Terwujudnya Lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal Daerah yang Handal, Unggul, Transparan dan Akuntabel dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Konawe”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah: Menyelenggarakan administrasi perkantoran; Meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang cepat, handal, unggul transparan, dan akuntabel; Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional; Mengembangkan capaian kinerja dan keuangan OPD di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah; Menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Konawe; Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala kabupaten; Melaksanakan pengelolaan data, informasi, pengendalian dan pengawasan; Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan dan pengaduan; Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar SKPD terkait guna mempercepat perizinan; Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang perizinan selaku pelaku usaha; Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non-perizinan; serta Mengoptimalkan pengelolaan PAD dan sektor retribusi daerah (IMB).



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah disusun dan dilaksanakan pada tahun 2021. Hasil pelaksanaan kegiatan, kinerja kegiatan serta kinerja pencapaian sasaran program pembangunan tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat dalam isi laporan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tahun 2021.

Melalui LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Tahun 2018-2023 serta dapat menjadi indikator bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe berperan dalam mendukung pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Konawe.

Unaaha, Februari 2022
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP.196407091992031011



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah SWT, zat yang Maha Pencipta sebagai satu-satunya zat yang patut dan pantas kita ibadahi hingga akhir, yang senantiasa memberikan kenikmatan lahir dan bathin kepada kita semua. Terima kasih kepada-Nya atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021 disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat hal-hal pokok tentang pelaksanaan kegiatan dan hasilnya maupun masalah yang dihadapi serta upaya tindak lanjut yang telah ditempuh. Yang secara khusus berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2021, yang merupakan capaian kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023).



Dalam mencapai sasaran pembangunan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pelaksanaan kinerjanya dilaksanakan terpadu secara horizontal dengan instansi teknis terkait dan secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan yang melekat pada masing-masing tingkatan. Oleh sebab itu, pencapaian kinerja pembangunan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat bervariasi antar Kabupaten dan Kota sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah setempat dalam menyediakan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun pendanaan yang memadai.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 banyak tantangan dan hambatan terutama yang diluar kendali, antara lain pembiayaan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang masih kurang sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, masih ditemukan berbagai masalah yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral dan pemberdayaan masyarakat secara intensif.

Akhirnya kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk perbaikan program/kegiatan serta kebijakan tahun-tahun mendatang dalam rangka mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Bapak Kery Saiful Konggoasa dan Bapak (ALM) Gusli Topan Sabara, ST., MM, dalam kurun waktu lima tahun kedepan 2018-2023 yaitu:



“KONAWE YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2023”.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021, disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Unaaha, Februari 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP.196407091992031011



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.1.2 Susunan Organisasi	1
1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.1.4 Ketersediaan Sumber Daya Manusia	13
1.2. LANDASAN HUKUM	14
1.3. ISU STRATEGIS.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2018-2023.....	17
2.1.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	18
2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20
2.1.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	22
2.1.4. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2021	41
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	46
2.4. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021.....	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	54
1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021.....	64



2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020	66
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD.....	69
4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TERHADAP PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN	72
5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA	79
6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.....	80
B.REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN.....	87
1. REALISASI ANGGARAN	87
2.EFISIENSI ANGGARAN	91
BAB IV PENUTUP	93
4.1. KESIMPULAN	93
4.2. SARAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe	21
Tabel 3. 1.Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Beserta Target Capaian Hingga Periode Akhir Renstra Perubahan OPD	56
Tabel 3. 2.Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023	56
Tabel 3. 3.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	64
Tabel 3. 4.Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dan Tahun Akhir Periode Renstra OPD	69
Tabel 3. 5.Analisis Capaian Kinerja Terhadap Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	72
Tabel 3. 6.Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021	79
Tabel 3. 7.Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2021	81
Tabel 3. 8.Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021	87
Tabel 3. 9.Realisasi Anggaran Belanja Operasi Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2021	88
Tabel 3. 10.Realisasi Anggaran Belanja Modal Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2021	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.....	2
Gambar 2.Kegiatan Bidang Kebijakan Penanaman Modal	75
Gambar 3.Kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan.....	76
Gambar 4.Kegiatan Bidang Pengendalian Dan Pengawasan	77
Gambar 5.Kegiatan Bidang Data Dan Informasi.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Konawe. Susunan dan Tata Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat dengan 3 Sub. Bagian :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3. Bidang Kebijakan Penanaman Modal dengan 3 Seksi :

- 1) Seksi Pengembangan Potensi dan Iklim Investasi;
- 2) Seksi Promosi dan Kerjasama; dan
- 3) Seksi Pelayanan Penanaman Modal.

4. Bidang Pelayanan Perizinan dengan 3 Seksi :

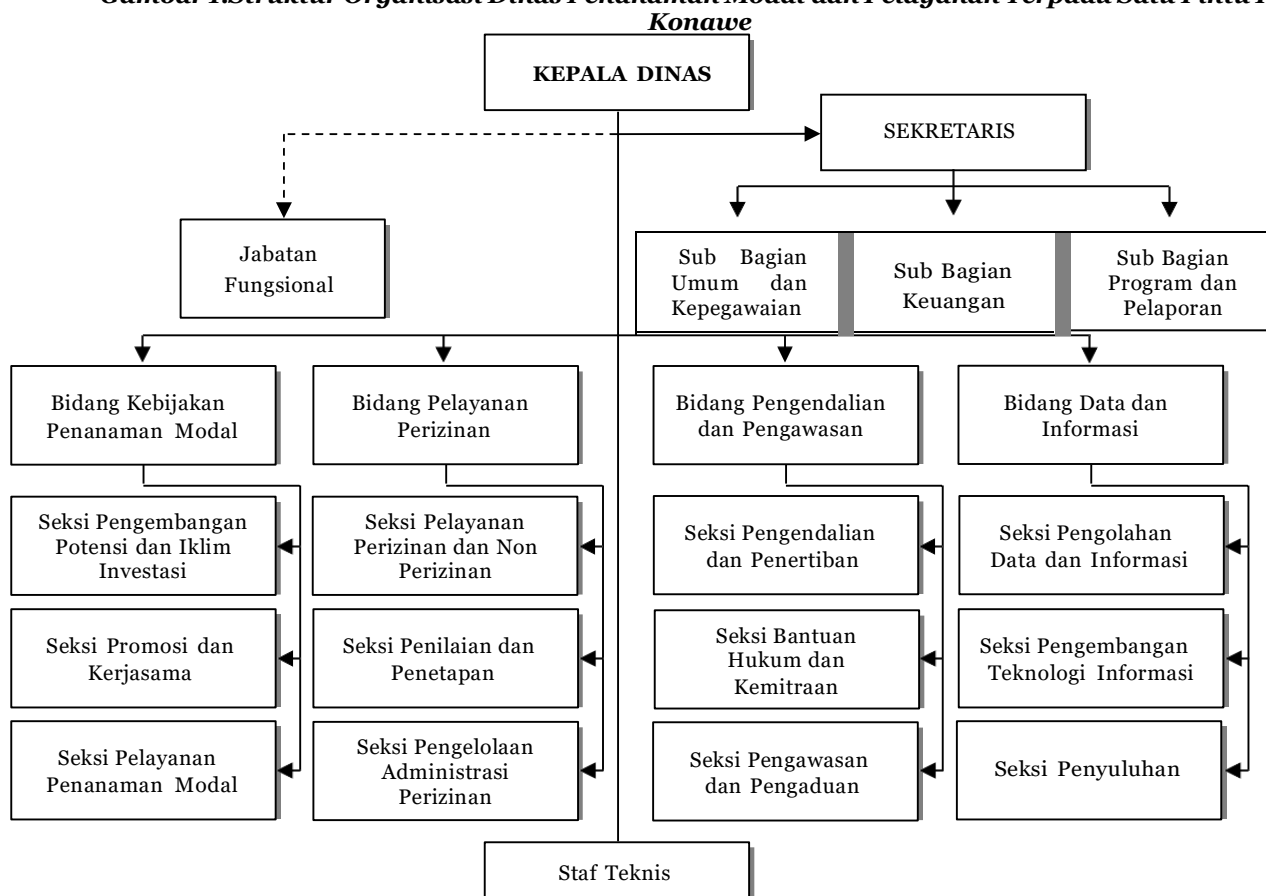
- 1) Seksi Pelayanan Perizinan/Non Perizinan;
- 2) Seksi Penilaian dan Penetapan; dan



- 3) Seksi Pengelolaan Administrasi Perizinan.
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan dengan 3 Seksi :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Penertiban;
 - 2) Seksi Seksi Bantuan Hukum dan Kemitraan; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengaduan.
6. Bidang Data dan Informasi dengan 3 Seksi :
 - 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi; dan
 - 3) Seksi Penyuluhan.
7. Tim Teknis sebanyak 8 orang dari 7 OPD teknis.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe, dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten





1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tersebut dioperasionalisasikan kedalam pembagian kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;



- c. Memberikan rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
- e. Memimpin, mengawasi, menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) skala Kabupaten;
- g. Memantau pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah;
- i. Menyampaikan saran kepada Kepala Daerah tentang kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hasil penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk disampaikan kepada Kepala Daerah serta unsur-unsur terkait lainnya untuk bahan



evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

2. Sekretaris;

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan program sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi :

- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- b. Merumuskan program kegiatan di bidang ketatausahaan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atasan;
- c. Melakukan koordinasi teknis dengan satuan kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang ketatausahaan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan mengendalikan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan menjabarkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan terhadap sub-sub bagian dibawahnya yang meliputi :
 - Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi surat menyurat;



- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi barang/ perlengkapan kantor;
 - Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pendaya gunaan ketenaga kerjaan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi bahan pustaka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan, pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai.
 - Melaksanakan advokasi hukum yang berkaitan dengan masalah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Mengambil kebijakan penyelesaian masalah yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- g. Membuat laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan untuk bahan evaluasi atasan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat terbagi atas 3 sub Bagian di antaranya adalah sebagai berikut :

- Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub. Bagian Keuangan



- Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Kebijakan Penanaman Modal

Tugas Pokok : Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelaksanaan kebijakan penanaman modal sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi :

- a. Menyusun rencana pengembangan potensi dan iklim investasi, promosi dan kerjasama serta pelayanan penanaman modal;
- b. Melakukan pengawasan, menganalisis data dan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan penanaman modal;
- c. Merumuskan dan menyusun materi perundang-undangan meliputi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) di bidang penanaman modal;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan potensi dan iklim investasi, promosi dan kerjasama serta pelayanan Penanaman modal tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- e. Menyusun rancangan kegiatan anggaran (RKA) yang merujuk pada RPJM, Renstra dan program pemerintah kabupaten lainnya di bidang penanaman modal;
- f. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dari berbagai potensi dan menyusun skala prioritas untuk



kepentingan perencanaan penanaman modal;

- g. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi lain lintas sektor menyangkut kebijakan penanaman modal;
- h. Memfasilitasi dalam pemberian izin bagi investor/pelaku usaha di bidang penanaman modal;
- i. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA);
- j. Menyusun laporan berkala hasil pelaksanaan kebijakan penanaman modal untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bidang Kebijakan Penanaman Modal Terbagi Atas 3 Kepala Sub Bagian (Seksi) Diantara adalah sebagai Berikut :

- Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Iklim Investasi
- Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama
- Kepala Seksi Pelayanan Penanaman Modal

4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan / non perizinan, administrasi dan pemrosesan perizinan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional bidang



- elayanan perizinan/ non perizinan sesuai dengan rencana kerja;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis/mekanisme dan persyaratan yang berkaitan dengan perizinan/ non perizinan;
 - c. Merumuskan dan menyusun materi perundang-undangan atau Perda di bidang perizinan/ non perizinan;
 - d. Mengoordinasikan dengan instansi atau unit kerja terkait;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan proses pemberian pelayanan perizinan/ non perizinan;
 - f. Menyelenggarakan rencana kegiatan operasional bidang kebijakan pelayanan perizinan/non perizinan sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan yang meliputi:
 - Pertimbangan dan berita acara pemeriksaan lapangan;
 - Kelengkapan persyaratan memperoleh izin;
 - Menetapkan izin dan pengelolaan penertiban izin;
 - Melakukan pertimbangan dan membuat BAP lapangan.
 - g. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perizinan untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bidang Pelayanan Perizinan terbagi atas 3 Kepala Sub Bagian (Seksi)



diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kepala Seksi Pelayanan Perizinan/Non Perizinan
- Kepala Seksi Penilaian dan Penetapan
- Kepala Seksi Pengelolaan Administrasi Perizinan

5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pengendalian dan pengawasan, koordinasi, fasilitasi bantuan hukum dan kemitraan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur bidang pengendalian dan pengawasan.

Fungsi :

- a. Menyusun Program Kegiatan Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- b. Menyusun dan Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. Melaksanakan fungsi pengendalian, penertiban, pengawasan dan pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum dan kemitraan;
- e. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan kualitas



sumberdaya aparatur bidang pengendalian dan pengawasan;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dan pengawasan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan terbagi atas 3 Kepala Sub Bagian (Seksi) diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban
- Kepala Seksi Bantuan Hukum dan Kemitraan
- Kepala Seksi Pengawasan dan Pengaduan

6. Kepala Bidang Data dan Informasi

Tugas Pokok : Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang data dan informasi sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Fungsi :

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengolahan data, pengembangan teknologi Informasi dan penyuluhan dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- b. Merumuskan dan menyusun materi perundang-undangan daerah (Perda) di bidang data dan Informasi;



- c. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang data, Pengembangan teknologi Informasi dan penyuluhan dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- d. Melaksanakan peningkatkan sistem pelayanan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- e. Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di bidang data dan informasi yang berkompeten dan berkualitas;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas layanan di bidang data dan informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- g. Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- h. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kab. Konawe.

Bidang Data dan Informasi terbagi atas 3 Kepala Seksi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi
- Kepala Seksi Penyuluhan



1.1.4 Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dapat dilihat dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sampai dengan Desember 2021 berjumlah 43 orang dengan perincian seperti pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe

No	Uraian	Jumlah (orang)	Ket.
1	ASN	43	
2	Jabatan Eselon : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV d. Staf	1 5 15 22	
3	Jabatan Fungsional	-	
4	Pegawai Menurut Golongan : a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	8 28 7 -	
5	Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan : a. Strata 3 (S3) b. Strata 2 (S2) c. Strata 1 (S1) d. D3 e. SLTA	- 9 25 - 9	
6	Pegawai Menurut Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan	19 24	
7	Pegawai Menurut Status ASN : a. ASN b. CPNS	43 -	
8	Non ASN	14	



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2020 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 13c Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
14. Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.



1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2021 adalah:

1. Kapasitas kelembagaan yang mewadahi dan memfasilitasi pelayanan penanaman modal daerah belum optimal. Masalah kapasitas kelembagaan harus diperbaiki meliputi kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, Promosi investasi yang masih kurang, serta regulasi yang sesuai dengan kondisi pelayanan perizinan saat ini khususnya di bidang penanaman modal. Dalam hal regulasi diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi baik dari tingkat pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah.
2. Belum tersedianya akses, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan. Ketersediaan akses, sarana dan prasarana merupakan penunjang daya tarik investasi dan mendukung kegiatan operasional investasi daerah. Sehingga perlu dilakukan peningkatan akses, sarana dan prasarana yang ada baik ketersediaan gedung kantor yang representative maupun sarana dan prasarana yang menunjang bagi pelaksanaan pelayanan publik di bidang penanaman modal.
3. Masih terbatasnya akses publik mengenai informasi investasi di Kabupaten Konawe baik melalui media cetak maupun media elektronik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2018-2023

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra Perubahan tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai OPD yang terkait langsung dengan fungsi penanaman modal dan pelayanan perizinan, rencana strategis perubahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan capaian rencana kerja tahunan (RKT) sehingga adanya sinergitas capaian yang ingin dicapai terhadap program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada Rencana Strategis Perubahan harus mendukung capaian program yang meliputi nilai investasi, potensi investasi, izin yang diterbitkan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dapat dikembangkan di Kabupaten Konawe.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Konawe berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Konawe.

2.1.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Bapak Kery Saiful Konggoasa dan Bapak Gusli Topan Sabara, ST., MM, dalam kurun waktu lima tahun kedepan 2018-2023 yaitu :

“KONawe YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2023”

Misinya adalah :

- 1) MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONawe.
- 2) MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONawe.
- 3) MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB.
- 4) MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Menyelaraskan Visi Misi Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi 1(Satu) yaitu:

“Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian,



Peternakan dan Perikanan serta Kawasan Industri sebagai Program Utama Pembangunan Konawe”.

dan Misi ke-3 yaitu”

“Menjadikan Pembangunan Birokrasi yang Handal dan Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Akuntabel sebagai Program Pendukung Wajib”.

Misi ke-1 dan ke-3 dimaksudkan untuk menciptakan kualitas SDM masyarakat Konawe yang memiliki daya saing yang tangguh ditengah kompetisi dan dinamika global yang semakin kompleks. dimana dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pengembangan ekonomi masyarakat Konawe berasal dari potensi unggulan dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Misi menjadikan Kawasan Sektor Kawasan Industri dan Menjadikan Pembangunan Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Akuntabel sejalan dengan Visi pembangunan Kabupaten Konawe untuk mewujudkan

“Konawe yang maju dan mandiri tahun 2023”

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe merumuskan Renstra lima tahun ke depan sebagai berikut:

- a. Memberi Kemudahan bagi calon investor untuk mengakses berbagai informasi mengenai potensi investasi daerah serta menyediakan fasilitas dan layanan yang exelent.



- b. Menyediakan gedung kantor yang layak beserta perlengkapannya untuk memenuhi standarisasi pelayanan publik.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Konawe secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan.

Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Konawe sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya berkewajiban untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran dari Misi ke 1 dan Misi ke 3.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam periode 2019-2023 ditetapkan sebagai berikut:

Misi 1 : Menjadikan Kawasan Industri Sebagai Program Utama Pembangunan Konawe.

Tujuan ke-3 dari Misi (1) adalah :

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah”

Sasaran dari Tujuan ke-3 adalah :

Meningkatnya realisasi investasi baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.

Misi 3 : Menjadikan Pembangunan Birokrasi yang Handal dan Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib.

Tujuan ke 1, Misi 3 ini adalah :

Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah



Kabupaten Konawe”.

Sasaran dari tujuan ke-1 adalah :

Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana publik.

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe

No	MISI	TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPMPSTP KAB. KONAWE	
		TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	MENJADIKAN SEKTOR KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang Berkualitas Melalui Pemanfaatan Dan Optimalisasi potensi local Daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Meningkatnya investasi di Kawasan Industry Potensial
2	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB	Terwujudnya Pelayanan prima di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe	Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadminist Rasian program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe



2.1.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program dan kegiatan prioritas pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama periode lima tahun. Setiap program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerjanya dan target yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yang kemudian akan dibandingkan dengan perencanaan pada awal periode perencanaan.

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan pada tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2.Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023

KODE REKENING	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM								OPD		
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI AKHIR				
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN													
1.1	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000		7.000.000.000.000		8.000.000.000.000		30.700.000.000.000				
1.1.1	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi Investasi (PMDN / PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000		7.000.000.000.000		8.000.000.000.000		30.700.000.000.000				
		Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik				
18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100	22.723.000	100	24.995.300	100	27.494.830	100	75.213.130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
18	2	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	22.723.000	2	24.995.300	2	27.494.830	6	75.213.130	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
2021

18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah	Dokumen	1	7.175.000	1	7.892.500	1	8.681.750	3	23.749.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	1	15.548.000	1	17.102.800	1	18.813.080	3	51.463.880	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100	22.497.124	100	24.746.836	100	27.221.520	100	74.465.480	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	2	22.497.124	3	24.746.836	2	27.221.520	7	74.465.480	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penyusunan strategi promosi penanaman modal daerah yang telah terpublikasi	Dokumen	1	9.090.000	1	9.999.000	1	10.998.900	3	30.087.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi Baik Daerah Maupun Luar Daerah	Event	4	13.407.124	3	14.747.836	3	16.222.620	10	44.377.580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENYELESAI IZIN YANG DITERBITKAN	%	100	63.951.633	100	45.150.196	100	49.665.216	100	158.767.045	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin	700	63.951.633	2.500	45.150.196	2.500	49.665.216	5.700	158.767.045	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Izin yang diterbitkan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	21.855.633	2	24.041.196	2	26.445.316	6	72.342.145	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	1	8.620.000	1	9.482.000	1	10.430.200	3	28.532.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	1	10.570.000	1	11.627.000	1	12.789.700	3	34.986.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
2021

18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	1	22.906.000					1	22.906.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100	167.908.000	100	184.698.800	100	203.168.680	100	555.775.480	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	3	167.908.000	80	184.698.800	88	203.168.680	171	555.775.480	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dipantau	Objek	1	55.249.000	80	60.773.900	88	66.851.290	169	182.874.190	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dibina	Objek	1	15.380.000	80	16.918.000	88	18.609.800	169	50.907.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang diawasi	Objek	1	97.279.000	80	107.006.900	88	117.707.590	169	321.993.490	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100	185.773.000	100	204.350.300	100	224.785.330	100	614.908.630	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	185.773.000	11	204.350.300	11	224.785.330	33	614.908.630	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi yang dikelola	Aplikasi	2	185.773.000	2	204.350.300	2	224.785.330	6	614.908.630	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3				Menjadikan Pembangunan Birokrasi yang Handal dan Pelayanan Publik Efisien, Efektif dan Akuntabel sebagai Program Pendukung Wajib											
3.1	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik			Penilaian SAKIP	Status	BB		AA		AA		AA			
3.2				Penilaian LPPD	Status	SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI			
3.3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu			Predikat SAKIP OPD	Status	BB		AA		AA		AA			
3.4				Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	0%		0%		0%		0%			



18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	5.067.323.960	100	5.574.056.356	100	6.131.461.992	100	16.772.842.308	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	56.730.438	8	62.403.482	8	68.643.830	24	187.777.750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.291.000	2	14.620.100	2	16.082.110	6	43.993.210	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.318.000	1	8.049.800	1	8.854.780	3	24.222.580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.289.938	1	8.018.932	1	8.820.825	3	24.129.695	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.960.000	1	7.656.000	1	8.421.600	3	23.037.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
2021

18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.010.000	1	7.711.000	1	8.482.100	3	23.203.100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7.890.000	1	8.679.000	1	9.546.900	3	26.115.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	6.971.500	1	7.668.650	1	8.435.515	3	23.075.665	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.588.680.522	4	5.047.548.574	4	5.552.303.432	12	15.188.532.528	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	4.541.039.422	14	4.995.143.364	14	5.494.657.701	42	15.030.840.487	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	32.520.000	1	35.772.000	1	39.349.200	3	107.641.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
2021

18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.232.500	1	7.955.750	1	8.751.325	3	23.939.575	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	7.888.600	1	8.677.460	1	9.545.206	3	26.111.266	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	9.000.000	1	9.900.000	1	10.890.000	3	29.790.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.000.000	1	9.900.000	1	10.890.000	3	29.790.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	57.903.000	12	63.693.300	12	70.062.630	36	191.658.930	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12.688.000	12	13.956.800	12	15.352.480	36	41.997.280	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
2021

18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	5.220.000	12	5.742.000	12	6.316.200	36	17.278.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	4.100.000	12	4.510.000	12	4.961.000	36	13.571.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	35.895.000	4	39.484.500	4	43.432.950	12	118.812.450	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	7.500.000	1	8.250.000	1	9.075.000	3	24.825.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	7.500.000	1	8.250.000	1	9.075.000	3	24.825.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	319.260.000	12	351.186.000	12	386.304.600	36	1.056.750.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
2021

18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	24.060.000	12	26.466.000	12	29.112.600	36	79.638.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	295.200.000	12	324.720.000	12	357.192.000	36	977.112.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	28.250.000	1	31.075.000	1	34.182.500	3	93.507.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	28.250.000	1	31.075.000	1	34.182.500	3	93.507.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2.1.4. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konaawe Tahun 2021-2023

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2.18	0.00	0.00	01.0000								
2	18	01			PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	8	24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	01	2.01	05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	06	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	07	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02		Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	01	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	03	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	01	2.02	07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03	06	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	02	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	04	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	05	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	01	2.06	09	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	4	4	12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	1	1	#REF!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	10	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	02	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	04	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	1	1	#REF!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	01	2.09	02	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01		Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	01	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	02	Jumlah Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01		Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	2	3	2	7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	03	2.01	01	Jumlah Dokumen Penyusunan strategi promosi penanaman modal daerah yang telah terpublikasi	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	02	Jumlah Pameran Investasi Baik Daerah Maupun Luar Daerah	Event	4	3	3	10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin	700	2.500	2.500	5.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	01	Jumlah Laporan Izin yang diterbitkan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	02	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	03	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	04	2.01	04	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	1			1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01		Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	3	80	88	171	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	01	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dipantau	Objek	1	80	88	169	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	02	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dibina	Objek	1	80	88	169	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	03	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang diawasi	Objek	1	80	88	169	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	06	2.01		Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	11	11	33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.01	01	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi yang dikelola	Aplikasi	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel 2. 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KONAWE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	Rp. 4.518.123.973.708	Rp.4.700.000.000.000	Rp.5.000.000.000.000	Rp.6.000.000.000.000	Rp. 7.000.000.000.000	Rp. 8.000.000.000.000	Rp. 30.700.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	82.88 (Baik)	84 (Baik)	90 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)



2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2021

Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe termuat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2.18	0.00	0.00	01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.530.176.717
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.067.323.960
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	56.730.438
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.291.000
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.318.000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.289.938
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.960.000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.010.000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7.890.000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	6.971.500
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.588.680.522
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	4.541.039.422
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	32.520.000
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.232.500
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	7.888.600
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	9.000.000
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.000.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	57.903.000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12.688.000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	5.220.000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	4.100.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	35.895.000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	7.500.000
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	7.500.000
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	319.260.000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	24.060.000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	295.200.000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	28.250.000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	28.250.000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	22.723.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	22.723.000
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah	Dokumen	0	7.175.000
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	1	15.548.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	22.497.124
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	2	22.497.124
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penyusunan strategi promosi penanaman modal daerah yang telah terpublikasi	Dokumen	1	9.090.000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi Baik Daerah Maupun Luar Daerah	Event	4	13.407.124
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	63.951.633
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin	700	63.951.633



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Izin yang diterbitkan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	21.855.633
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	1	8.620.000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	1	10.570.000
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	1	22.906.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	167.908.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	3	167.908.000
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dipantau	Objek	1	55.249.000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dibina	Objek	1	15.380.000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang diawasi	Objek	1	97.279.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	185.773.000



KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
1					2	3	4	TARGET	ANGGARAN
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	185.773.000
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi yang dikelola	Aplikasi	2	185.773.000

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran strategis yang ingin dicapai SKPD pada Tahun 2021 tertuang di dalam Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2018-2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2021. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya investasi di kawasan industri potensial
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021 :



Tabel 2. 6. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi Investasi (PMDN / PMA)	6.000.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	100 (Sangat Baik)
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat SAKIP	BB
		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0%

2.4. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PERUBAHAN , maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe pada tahun 2021 melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 32 SubKegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp. 5.397.891.171 Adapun anggaran berdasarkan program dan kegiatan serta penetapan target *output/outcome* pada masing-masing kegiatan untuk tahun 2021 disajikan pada tabel 2.9 berikut :



Tabel 2. 7. Anggaran Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konaawe Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2.18	0.00	0.00	01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.397.891.171
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.924.531.538
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	56.730.438
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.291.000
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.318.000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.289.938
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.960.000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.010.000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7.890.000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	6.971.500



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.320.898.100
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	4.273.257.000
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	32.520.000
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.232.500
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	7.888.600
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	9.000.000
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.000.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	159.428.600
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	46.832.000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	5.220.000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5.205.600
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	102.171.000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	7.500.000
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	7.500.000
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	325.200.000
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	24.000.000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	301.200.000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	45.774.400
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	45.774.400
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	13.882.000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	13.882.000
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah	Dokumen	0	7.175.000
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	1	6.707.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	4.120.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	2	4.120.000
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penyusunan strategi promosi penanaman modal daerah yang telah terpublikasi	Dokumen	1	4.120.000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi Baik Daerah Maupun Luar Daerah	Event	4	-
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	120.488.633
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin	700	120.488.633
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Izin yang diterbitkan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	21.855.633



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	1	49.575.000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	1	35.230.000
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	1	13.828.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	149.096.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	3	149.096.000
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dipantau	Objek	1	47.130.000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dibina	Objek	1	10.766.000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang diawasi	Objek	1	91.200.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	185.773.000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	185.773.000



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM RENSTRA	
								TARGET	ANGGARAN
1					2	3	4	5	6
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi yang dikelola	Aplikasi	2	185.773.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam tahun anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe telah menetapkan 2 (Dua) sasaran yang akan dicapai dengan 2 (Dua) indikator kinerja. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 2 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator



Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator-indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe beserta target capaian hingga periode akhir Renstra OPD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1. Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Beserta Target Capaian Hingga Periode Akhir Renstra Perubahan OPD

N O	SASARAN STRATEGI S	INDIKATO R KINERJA UTAMA	SATUA N	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR
					TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	Rp. 4.518.123.973.708	Rp.4.700.000.000.000	Rp.5.000.000.000.000	Rp.6.000.000.000.000	Rp. 7.000.000.000.000	Rp. 8.000.000.000.000	Rp. 30.700.000.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	82.88 (Baik)	84 (Baik)	90 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)	100 (Sangat Baik)

Tabel 3. 2. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021				KONDISI AKHIR	OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
2.18	0.00	0.00	01.0000									
2	18	01			PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	100,00	100,00	100,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	8	24		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	01	2.01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	06	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	07	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	01	2.02		Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	01	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	14	42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	03	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	18	01	2.03		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03	06	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021				KONDISI AKHIR	OPD
							TAHUN 2021		TAHUN 2022	TAHUN 2023		
							TARGET		TARGET	TARGET		
1					2	3	4		5	6	7	8
2	18	01	2.06		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12		12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	02	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12		12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	04	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12		12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	05	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12		12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	09	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4		4	4	12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1		1	1	#REF!	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	10	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1		1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	01	2.08		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	02	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	04	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	02	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01		Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	02	2.01	01	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	02	Jumlah Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01		Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	2	3	2	7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	01	Jumlah Dokumen Penyusunan strategi promosi penanaman modal daerah yang telah terpublikasi	Dokumen	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	02	Jumlah Pameran Investasi Baik Daerah maupun Luar Daerah	Event	4	3	3	10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	04	2.01		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin	700	2.500	2.500	5.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	01	Jumlah Laporan Izin yang diterbitkan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	02	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	03	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	1	1	1	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	04	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	1			1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01		Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	3	80	88	171	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					INDIKATOR KINERJA	SATUAN					OPD
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KONDISI AKHIR	
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	18	05	2.01	01	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dipantau	Objek	1	80	88	169	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	02	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dibina	Objek	1	80	88	169	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	03	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang diawasi	Objek	1	80	88	169	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.01		Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	11	11	33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.01	01	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi yang dikelola	Aplikasi	2	2	2	6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe yang telah dicapai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi Investasi (PMDN / PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000	20.056.609.126.437	334%
		Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	100(Baik)	85 (Baik)	85%
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadministrasian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat SAKIP	Status	B B	A	100%

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021 dapat diketahui dengan menggunakan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Dinas Penanam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dengan hasil sebagai



berikut :

1.1. Sasaran pertama adalah meningkatnya investasi di kawasan industri potensial. Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi tahun 2021 dapat diketahui hasil pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja, yaitu :

- a. Realisasi investasi (PMDN/PMA) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 6.000.000.000.000,- dengan pencapaian realisasi investasi (PMDN/PMA) sebesar Rp. 20.056.609.126.437,- sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 334%. Realisasi investasi (PMDN/PMA) tersebut berdasarkan data pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2021 yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang kegiatan usahanya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe dengan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Perusahaan/ Nomor Induk Berusaha.
- b. Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 ditargetkan berada pada kategori baik dengan realisasi pencapaian yang diperoleh, yaitu kategori baik. Sehingga persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas hasil survey terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe menunjukkan Nilai Interval (NI) 3,401 dan Nilai Interval Konversi (NIK) 85, artinya kinerja unit pelayanan B (Baik).

1.2. Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan



pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi tahun 2020 dapat diketahui hasil pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja, yaitu :

- a. Persentase SAKIP pada tahun 2021 ditargetkan Status BB dengan output dari rencana tersusun 1 dokumen LAKIP. Realisasi SAKIP adalah A dengan tersusunnya 1 dokumen LAKIP, maka capaian kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
				REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	7	8	7	8
1	Meningkatnya investasi dikawasan industri potensial	Realisasi Investasi (PMDN / PMA)	Rupiah	34.774.631.884.434	695,49	20.056.609.126.437	334%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
				REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	7	8	7	8
		Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	85 (Baik)	94%	85 (Baik)	85%
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadministrasian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat SAKIP	Status	BB	100	BB	100

1.3. Sasaran pertama adalah meningkatnya investasi di kawasan industri potensial. Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 dapat diketahui perbandingannya dengan menggunakan indikator kinerja, yaitu :

- Realisasi investasi (PMDN/PMA) pada Tahun 2021 sebesar Rp. 20.056.609.126.437,- dengan capaian kinerja 334% dari realisasi investasi (PMDN/PMA) yang ditargetkan. Sedangkan realisasi investasi (PMDN/PMA) pada tahun 2020 sebesar Rp. 34.774.631.884.434,- dengan capaian kinerja 695,49% dari realisasi investasi yang ditargetkan Terjadi penurunan yang signifikan terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.
- Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 berada pada kategori baik dari target yang ditetapkan kategori baik dengan



Nilai IKM 85. Persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2020, Indeks/ Survey Kepuasan Masyarakat berada pada kategori baik dari target yang ditetapkan kategori baik dengan Nilai IKM 83,84. Persentase capaian kinerja tahun 2020 sebesar 94%. Berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, terjadi Penurunan kinerja unit pelayanan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

- 1.4. Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 dapat diketahui perbandingannya dengan menggunakan indikator kinerja, yaitu :
 - a. Persentase SAKIP pada tahun 2021 berdasarkan target output tersusun 2 dokumen (SAKIP dan LAKIP), terealisasi dengan nilai BB dengan capaian kinerja sebesar 100% Sedangkan pada tahun 2020 berdasarkan target output tersusun 2 dokumen (SAKIP dan LAKIP), terealisasi dengan nilai BB dengan capaian kinerja sebesar 100%

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA OPD

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dan tahun akhir periode renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe disajikan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3. 4.Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021 dan Tahun Akhir Periode Renstra OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI KINERJA		TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA OPD
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya investasi di kawasan industri potensial	Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	34.774.631.884.434	20.056.609.126.437	30.700.000.000.000
		Indeks / Survey Kepuasan Masyarakat	Range	85 (Baik)	85 (Baik)	100 (SANGAT BAIK)
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadministrasian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat SAKIP	Status	BB	BB	A

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dan tahun akhir periode Renstra OPD berdasarkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sebagai berikut :

- 3.1.3.1 Sasaran pertama adalah meningkatnya investasi di kawasan industri potensial. Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja 2020 dan tahun 2021 sampai dengan tahun akhir periode Renstra OPD dapat diketahui perbandingannya dengan menggunakan indikator kinerja, yaitu :
 - 3.1.3.1.1 Realisasi investasi (PMDN/PMA) pada Tahun 2021 sebesar Rp. 20.056.609.126.437,-, sedangkan target realisasi investasi (PMDN/PMA) pada tahun akhir periode RENSTRA OPD (Tahun 2023) sebesar Rp. 30.700.000.000.000,-. Angka ini menunjukkan bahwa, realisasi investasi (PMDN/PMA) pada tahun 2021 pencapaiannya lebih rendah dibandingkan dengan target tahun akhir periode RENSTRA OPD (Tahun 2023).
 - 3.1.3.1.2 Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 pencapaiannya berada pada kategori baik dengan Nilai IKM 85. Sedangkan pada tahun akhir periode RENSTRA OPD (Tahun 2023) target Indeks/ Survey Kepuasan Masyarakat berada pada kategori sangat baik dengan Nilai IKM 100.
- 3.1.3.2 Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dan tahun akhir periode Renstra OPD dapat diketahui perbandingannya dengan menggunakan indikator kinerja, yaitu :
 - 3.1.3.2.1 Persentase SAKIP pada tahun 2021 terealisasi 100% berdasarkan *output* tersusun 1 dokumen SAKIP dengan status penilaian BB , sedangkan pada tahun akhir periode RENSTRA OPD (Tahun 2023) ditargetkan 100% berdasarkan *output*

tersusun 1 dokumen SAKIP dengan status penilaian A Jumlah seluruh dokumen SAKIP sampai dengan periode akhir RENSTRA adalah 5 dokumen.

3.1.4 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TERHADAP PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJASERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Analisis capaian kinerja terhadap peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			ANALISIS		ALTERNATIF SOLUSI	KET
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENINGKATAN KINERJA	PENURUNAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Meningkatkan realisasi investasi daerah	1 Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	6.000.000.000.000	20.056.609.126.437	334	Promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif melalui berbagi media	Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor Tertarik berinvestasi di Kabupaten Konawe	Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang konfrehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan	
							Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Konawe	Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini	Perlu penyesuaian dan harmonisasi regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			ANALISIS		ALTERNATIF SOLUSI	KET
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENINGKATAN KINERJA	PENURUNAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
									peraturan yang ada	
		2 Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat	Range	100 (Sangat Baik)	85 (Baik)	85	Adanya Komitmen Pimpinan dan Aparatur DPMPTSP dalam memaksimalkan pelayanan perizinan	Kurangnya SDM,sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang menunjang Pelayanan Aparatur	
							Tersedianya anggaran dan sarana penunjang kinerja	Keterbatasan sumber daya aparatur dan kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang layanan perizinan	Optimalisasi SDM dengan bimtek dan kursus dan memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi pelayanan	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadministrasian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	1 Persentase Laporan Keuangan	%	100	100	100	Komitmen Pimpinan dan Aparatur dalam penyusunan laporan keuangan	Kurangnya sumber daya aparatur dalam penyusunan laporan keuangan DPMPTSP	Optimalisasi dukungan Pimpinan dalam bentuk program dan kegiatan peningkatan Kapasitas Sumberdaya	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			ANALISIS		ALTERNATIF SOLUSI	KET
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENINGKATAN KINERJA	PENURUNAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Terpadu Satu Pintu	2 Persentase SAKIP	%	Status BB	BB	100%	Komitmen Pimpinan dan Aparatur dalam penyusunan laporan Kinerja DPMPSTP	Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana penunjang dalam penyusunan laporan Kinerja DPMPSTP	Optimalisasi dukungan Pimpinan dalam peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan sarana prasarana	
		3 Persentase LPPD	%	100	100 (Status Tinggi)	100	Komitmen Pimpinan dan Aparatur DPMPSTP dalam penyusunan LPPD yang tepat waktu	Belum optimalnya komitmen aparatur dalam menyusun LPPD karena permasalahan data yang tidak akurat.	Optimalisasi dukungan Pimpinan dan aparatur dalam bentuk program dan kegiatan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	

Gambar 2. Kegiatan Bidang Kebijakan Penanaman Modal



Gambar 3. Kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan



Gambar 4. Kegiatan Bidang Pengendalian Dan Pengawasan



Gambar 5. Kegiatan Bidang Data Dan Informasi





3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sampai dengan Desember 2021 berjumlah 43 orang dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. 6. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (orang)	%
1	Pegawai Menurut Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan	19 24	44 56
2	Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan : a. Strata 3 (S3) b. Strata 2 (S2) c. Strata 1 (S1) d. D3 e. SLTA	- 9 25 - 9	- 21 58 - 21
3	Pegawai Menurut Pangkat/Golongan : a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	8 28 7 -	19 65 16 -

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan DPMPPTSP Tahun 2021

Keadaan pegawai berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe sebanyak 43 orang yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 24 orang perempuan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi menurut tingkat pendidikan dengan jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan Strata 1 (S1) menduduki



peringkat pertama dengan 58%, pendidikan SLTA dengan 21% dan Strata 2 (S2) sebesar 21%. Sedangkan jumlah pegawai menurut pangkat/golongan menunjukkan bahwa pegawai Golongan III menduduki peringkat pertama dengan 65%, disusul pegawai Golongan IV dengan 19% dan pegawai Golongan II dengan 16%.

Keadaan pegawai tersebut jika dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe, masih kurang sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih belum efisien. Penambahan jumlah pegawai yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan distribusi aparatur secara proporsional ke unit kerja (sekretariat/ bidang) sesuai dengan beban kerjanya masing-masing dapat menjadi solusi dalam efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

3.1.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mewujudkan sasaran yang dicapai dilakukan analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja terhadap 6 Program, 12 Kegiatan dan 32 Subkegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 yang menunjang langsung terhadap pencapaian kinerja. Adapun program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut :



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

Tabel 3. 7. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2021

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	SATUAN	TAHUN 2021		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100	100
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1	100
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Dokumen	1	1	100
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	100
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	1	100
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	SATUAN	TAHUN 2021		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	100
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12	100
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	4	100
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	1	100
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	1	100
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	1	100
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	100
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100	100	100
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	2	100
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah	Dokumen	1	0	0



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	SATUAN	TAHUN 2021		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	1	1	100
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100	100	100
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	2	2	100
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penyusunan strategi promosi penanaman modal daerah yang telah terpublikasi	Dokumen	1	1	100
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi Baik Daerah Maupun Luar Daerah	Event	4	4	100
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100	100	100
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Izin	700	700	100
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Izin yang diterbitkan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	2	100
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	1	1	100
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	1	1	100
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	1	1	100



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	SATUAN	TAHUN 2021		
								TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100	100	100
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	3	3	100
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dipantau	Objek	1	1	100
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dibina	Objek	1	1	100
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang diawasi	Objek	1	1	100
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100	100	100
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	11	100
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi yang dikelola	Aplikasi	2	100	100

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tahun 2021 berdasarkan tabel 3.8 sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatkan investasi di kawasan industri potensial diwujudkan



dalam 5 Program, 5 kegiatan dengan 11 Subkegiatan, yaitu :

- a. Program Promosi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan capaian kinerja terealisasi 100%, terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%.
- b. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dengan 2 Subkegiatan dengan capaian kinerja sebesar 36% . Dimana 1 Subkegiatan dengan capaian kinerja terealisasi 74% yaitu Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan 1 Subkegiatan dengan capaian kinerja 0%. yaitu Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian



- c. Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang tidak terealisasi 100% disebabkan oleh besaran anggaran yang dialokasikan tidak memadai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Subkegiatan dengan capaian kinerja terealisasi 99%. yaitu kegiatan Pengendalian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat peninjauan dan pengawasan langsung terhadap obyek perizinan yang sangat menentukan besarnya nilai realisasi investasi, sehingga pelaksanaannya menjadi salah satu prioritas.
 - e. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 1 kegiatan dan 4 Subkegiatan capaian kinerja terealisasi 99%, disebabkan selama tahun 2021 pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan investasi di daerah dapat difasilitasi dengan baik di unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
 - f. Program Pengolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan capaian kinerja terealisasi 92%. Kegiatan pada program tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagai bentuk komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam mempermudah akses publik mengenai informasi investasi di Kabupaten Konawe melalui peningkatan kompetensi teknologi informasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian



program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwujudkan dalam 1 Program, 7 kegiatan dan 20 Subkegiatan, capaian kinerja terealisasi 99% Capaian tersebut diperoleh dengan terealisasinya target seluruh kegiatan sesuai dengan jumlah target dari indikator kinerja yang ditetapkan.

3.2 REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN

3.2.1 REALISASI ANGGARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam mewujudkan kinerjanya selama tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.397.891.171,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal

Langsung. Realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp.5.299.073.000 atau 98%. Adapun rincian realisasi anggaran tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 8. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Operasi	5.363.391.171	5.264.573.000	98
2	Belanja Modal	34.500.000	34.500.000	100
	Jumlah	5.397.891.171	5.299.073.000	98

Realisasi anggaran berdasarkan tabel di atas terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.264.573.000,- dari anggaran sebesar Rp. 5.363.391.171,- atau 98% dengan komponen Belanja Operasi , yaitu belanja pegawai dan Belanja barang dan jasa. Sedangkan



Belanja Modal sebesar Rp. 34.500.000,- dari anggaran sebesar Rp. 34.500.000,- atau 100% dengan komponen Modal, yaitu belanja Peralatan dan mesin.

Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang langsung mendukung pencapaian strategis, realisasinya dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3. 9. Realisasi Anggaran Belanja Operasi Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	ANGGARAN	REALISASI
1					2	3	4
2.18	0.00	0.00	01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.363.391.171	5.264.573.000
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.890.031.538	4.816.443.429
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.730.438	56.691.500
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.291.000	13.291.000
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.318.000	7.318.000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.289.938	7.251.000
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.960.000	6.960.000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.010.000	7.010.000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.890.000	7.890.000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.971.500	6.971.500
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.320.898.100	4.249.933.529
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.273.257.000	4.202.292.429
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.520.000	32.520.000
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.232.500	7.232.500
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.888.600	7.888.600



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	ANGGARAN	REALISASI
1					2	3	4
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000	9.000.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.428.600	132.199.000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.832.000	19.617.000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.220.000	5.220.000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.205.600	5.200.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.171.000	102.162.000
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.200.000	324.681.400
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	23.481.400
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.200.000	301.200.000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.774.400	43.938.000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.774.400	43.938.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	13.882.000	4.990.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.882.000	4.990.000
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7.175.000	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.707.000	4.990.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4.120.000	4.120.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.120.000	4.120.000
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	4.120.000	4.120.000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	120.488.633	118.848.000
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	120.488.633	118.848.000
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.855.633	21.365.000



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe
Tahun 2021*

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	ANGGARAN	REALISASI
1					2	3	4
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	49.575.000	49.575.000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	35.230.000	35.230.000
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	13.828.000	12.678.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	149.096.000	148.756.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	149.096.000	148.756.000
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	47.130.000	46.890.000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10.766.000	10.766.000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.200.000	91.100.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	185.773.000	171.415.571
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.773.000	171.415.571
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	185.773.000	171.415.571



Tabel 3. 10. Realisasi Anggaran Belanja Modal Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2021

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 50)	ANGGARAN	REALISASI
1					2	6	
2.18	0.00	0.00	01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	34.500.000	34.500.000
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.500.000	34.500.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.000.000	27.000.000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	27.000.000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000	7.500.000
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	7.500.000

Berdasarkan tabel. 3.10 di atas diketahui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 32 Subkegiatan

Penyerapan anggaran langsung pada tahun 2021 sebesar 98% dari total anggaran yang dialokasikan.

3.2.2 EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka



efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian seluruh sasaran yang menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan, namun realisasi capaian kinerjanya lebih besar dari yang ditargetkan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe tahun 2021 merupakan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam rangka pencapaian tahapan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe khususnya dalam urusan penanaman modal dan perizinan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (Dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 2 (dua) indikator kinerja dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis pertama yang tersurat dalam perjanjian kinerja tahun 2021 yaitu meningkatnya investasi di kawasan industri potensial dengan dua indikator kinerja yaitu realisasi investasi (PMDN/PMA) dan Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat. Indikator kinerja Pertama; Realisasi Investasi (PMDN/PMA) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 6.000.000.000.000- terealisasi sebesar

Rp. 20.056.609.126.437,- dengan persentase capaian kinerja sebesar 334%. Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat ditargetkan nilai IKM 100 (Baik) terealisasi dengan nilai IKM 85 (Baik) sehingga persentase capaian kinerja diperoleh 85%.

Sasaran strategis kedua Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadministrasian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe dengan 1 Indikator Kinerja yaitu Persentase SAKIP. Dimana Persentase SAKIP 100% Didukung oleh 1 Program, 1 Kegiatan dan 7 Subkegiatan , Jumlah anggaran program/kegiatan pada sasaran ini dialokasikan sebesar Rp. 56.730.438,- realisasi Rp. Rp. 56.691.500,- dengan persentase realisasi 99,93%.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 terhadap target realisasi kinerja dan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan dari program kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasi dari hasil kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kinerja kegiatan pada belanja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 98%
2. Hambatan dan permasalahan :
 - a. Program kegiatan untuk belanja kegiatan pada belanja program belum optimal karena banyak kegiatan anggarannya tidak realisasi karena faktor ketersediaan dana atau defisit APBD.
 - b. Belum semua pelaku usaha menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PMA/PMDN. Hal ini mengakibatkan perkembangan realisasi investasi belum diketahui secara pasti serta berpengaruh terhadap pembinaan yang harus dilakukan kepada investor

PMA/PMDN.

- c. Terhadap perkembangan investasi Kabupaten Konawe data yang disampaikan baru berdasarkan terhadap izin yang diterbitkan, sehingga belum mencerminkan data investasi secara keseluruhan.
3. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Konawe.
4. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
5. Belum optimal proses pelayanan PTSP pada pelayanan perizinan sesuai dengan SOP karena kewenangan perlengkapan persyaratan perizinan ada pada PD pemberi rekomendasi.
6. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sebagai pendukung pelayanan perizinan.

4.2. SARAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2018 s.d 2023.
2. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Pemerintah (DPMPTSP) khususnya terhadap program pusat dan daerah dengan pengusaha PMA/PMDN yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Konawe .

3. Mengusulkan dan mengkoordinasikan tentang potensi investasi dan nilai investasi kepada Perangkat Daerah terkait penerbitan izin yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sehingga adanya pembandingan terhadap nilai investasi berdasarkan izin yang dikeluarkan DPMPTSP dan nilai investasi yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan pemantauan pembinaan pengawasan terhadap PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Konawe.
5. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
6. Melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah pengolah rekomendasi untuk mempedomani SOP PTSP dalam memproses rekomendasi.
7. Melakukan Penataan Sumber Daya Manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Unaaha, Februari 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640709 1992031011